

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Respon Tujuh Puluh Lima Tahun Usia Indonesia

Melompat ke Jurang Krisis yang Lebih Curam?

Jakarta, 19 Agustus 2020— Pada 17 Agustus 2020, Indonesia genap berusia tujuh puluh lima tahun. Usia yang tidak sedikit, belum terlalu tua dan tidak terlalu muda sebagai sebuah negara. Sayangnya, usia merdeka tujuh puluh lima tahun belum mampu menjadikan Indonesia bijak sebagai otoritas negara yang mampu memberi rasa aman dan sejahtera bagi rakyatnya. Bahkan harapan tersebut sangat kontras dengan kondisi faktualnya. Kemiskinan berbanding lurus dengan laju kerusakan lingkungan hidup. Akses sejahtera dan kuasa demokrasi dibajak segelintir orang yang sama buruknya dengan mikro parasit (patogen yang hanya hidup dengan berparasit pada inang, lazimnya berenang pada hewan, namun dalam perkembangannya berpindah dan berparasit pada manusia-zoonis). Segelintir orang ini merupakan pengusaha dan politisi—baca penguasa—yang dapat kita sebutkan sebagai makro parasit.¹

Sajian ini akan memuat beberapa kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap kondisi faktual 75 tahun Indonesia merdeka. Terutama dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Kritik akan dimulai dari beberapa pernyataan Presiden Joko Widodo dalam dua pidatonya pada 14 Agustus 2020. Dalam kedua pidato tersebut, Jokowi mengajak segenap masyarakat untuk melompat dan membajak krisis, lengkap beserta aneka tawaran solusinya. Meski, bagi WALHI, segala bentuk tawaran solusi tersebut keliru. Dengan begitu, alih-alih terlepas dari krisis, tawaran solusi Jokowi justru akan mengantarkan Indonesia pada jurang krisis yang lebih terjal dan curam. Pada awal 2020, kondisi tersebut kami sebut dengan istilah krisis multidimensi.

1. Setting Ulang Sistem?

“Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar”.

Dalam pidato kenegarannya, Presiden Joko Widodo mengawali dengan penyampaian krisis Covid-19 yang melanda semua negara, tak terkecuali Indonesia. Presiden menegaskan krisis pandemi global harus dijadikan momentum untuk melakukan *setting* ulang semua sistem. Lalu pertanyaannya, sistem mana yang hendak diubah? Pidato tersebut sama sekali tidak memberi jawaban. Bahkan tawaran yang disampaikan justru menjadi sebuah jalan yang dapat memperparah krisis.

Terhadap pesan di atas, kami memberi dua catatan. **Pertama**, tidak ada sistem yang akan diatur ulang oleh Presiden. Sistem lama, ekonomi kapitalisme, tetap dipertahankan, bahkan diperkuat. Misalnya, ketika menyatakan niat melakukan *setting* ulang semua sistem, ia masih mendasarkan pernyataannya

¹ Arif Novianto, *Pengantar: Pandemi dan Kabar Buruk Barbarisme Pasar*, hal. v-vi dalam Slavoj Žižek, *Pandemik Covid-19 Mengguncang Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020). Diterjemahkan oleh Khoirul Maqin.

pada model ekonomi pertumbuhan (*economic growth*). Begitupula dengan alat ukurnya yang berupa PDB/GDP. Seruan moral dari ulama, pemuka agama dan tokoh budaya pun rasanya tidak mungkin didasarkan pada bisikan kebangkitan dan lompatan besar berbasis cara ukur tersebut. Apabila benar, bisa kiranya Tuan Presiden sebut ulama, pemuka agama, dan tokoh budaya mana yang mengajurkan pilihan pada alat ukur tersebut.

Kedua, membenahan secara fundamental dengan melakukan transformasi dan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja dan membuat strategi dan lompatan dalam bidang ekonomi, hukum, sosial kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Sudah enam bulan pandemi memilih manusia Indonesia sebagai inangnya. Tapi tidak ada sama sekali transformasi yang dimaksud. Justru yang ada hanya strategi besar untuk mempertahankan kuasa makro-parasit atau oligarki. Istana sebagai rumah Tuan Presiden bersama parlemen, malah membuka ruang besar bagi investasi untuk melanjutkan dan mempermudah praktik eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam. Ada pengesahan RUU Perubahan UU Minerba dan RUU Omnibus Law CILAKA tetap disebut pembahasannya. Fakta ini malah memperlihatkan, hukum didesain untuk melindungi kepentingan ekonomi segelintir pengusaha besar. Suara-suara penolakan tidak dihiraukan.

Lalu, transformasi seperti apa yang dimaksud? Apabila membiarkan praktik ekonomi ekstraktif terus berlangsung dan digdaya. Padahal praktik ini merupakan sumber utama mewabahnya penyakit zoonis. Pilihan ini sama artinya membiarkan orang kaya mengisolasi diri di ruang mewah setelah memabat habis rumah satwa. Sementara rakyat kecil mendapat hadiah patogen akibat kerusakan lingkungan. Pidato kenegaraan Presiden jelang hari kemerdekaan RI yang ke-75 ini tak lebih hanya retorik. Tidak memperlihatkan niat baru yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.

2. Memalsukan Peran Negara

Krisis kesehatan berdampak pada krisis perekonomian. Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah adalah memberikan aneka bentuk bantuan sosial. Namun secara faktual, bantuan sosial tersebut banyak mengandung masalah. Seperti tidak tepat sasarannya penerima bantuan dan terjadinya pemotongan bantuan sosial. Kasus pertama terungkap, salah satunya, saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Banten pada 30 Juni lalu. Di lapangan terungkap jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota dewan justru terdata sebagai penerima bantuan. Sementara untuk kasus kedua, temuan Polri menyebutkan jika terdapat delapan kasus pemotongan uang bansos.² Begitupula dengan bantuan dalam bentuk diskon untuk tarif listrik. Alih-alih menurun, banyak masyarakat yang justru merasakan kenaikan harga listrik. Padahal selama pandemi konsumsi listrik mereka berkurang.³

Selain itu, bantuan sosial bagi korban PHK dalam bentuk Program Prakerja juga bermasalah. Dalam kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

²<https://katadata.co.id/muhammadrinhoi/berita/5eff37fe0ff80/ragam-masalah-penyaluran-bansos-covid-19-yang-jadi-sorotan-jokowi> (Diakses pada 18 Agustus 2020, 01:38 WIB).

³Lihat misalnya: <https://regional.kompas.com/read/2020/06/18/05300041/menyoal-kenaikan-tarif-listrik-tagihan-melonjak-meski-penggunaan-berkurang?page=all> (Diakses pada 18 Agustus 2020, 01:38 WIB).

(KPK), terungkap bahwa kartu prakerja justru sarat akan konflik kepentingan, rawan fiktif, dan materinya pun tidak memadai.⁴ Konflik kepentingan yang dimaksud ialah terkait posisi Adamas Belva sebagai Staf Khusus Milenial era Presiden Jokowi. Bersamaan dengan itu, Adamas Belva juga tercatat sebagai CEO Ruang Guru—sebuah *platform* pendidikan yang terkait dengan penyedia bahan materi untuk program Prakerja. Belakangan Adamas Belva resmi menyatakan berhenti menjadi Staff Khusus presiden. Namun itu tetap tidak bisa menyembunyikan fakta terjadinya perburuan rente dalam lingkaran kekuasaan.

Di tengah melesunya perekonomian, masyarakat tentu saja menunggu bantuan sosial dari pemerintah. Namun sebenarnya, jika merujuk pada pasal 34 UUD 1945, hal tersebut memang sudah menjadi tanggungjawab negara. Termasuk saat tidak mewabahnya pandemi. Karena itu, penjabaran Presiden Jokowi tentang aneka bantuan sosial dalam pidatonya kemarin terkesan retorik belaka. Bahkan bertendensi hendak memalsukan peran negara sebelum wabah datang.

3. Kritik RAPBN

Pada kesempatan kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tentang RAPBN 2021. Pidato tersebut menggambarkan empat poin utama RAPBN 2021, yaitu (1) mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19; (2) mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan ekonomi; (3) mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; dan (4) pemanfaatan danantisipasi perubahan demografi.

Infrastruktur tetap mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dalam RAPBN 2021, sekitar 414 triliun. Alokasi anggaran infrastruktur akan digunakan untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas untuk mendukung kawasan industri dan pariwisata. Maksud konektivitas tidak lain adalah pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jaringan teknologi informasi, dan lain-lain. Dalam banyak kasus, pembangunan aneka infrastruktur kerap bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian kondisi lingkungan. Bahkan pembangunan infrastruktur kerap bertentangan dengan semangat ketahanan pangan yang dimaksud Jokowi dalam pidatonya. Bahkan tidak jarang pula, pembangunan infrastruktur malah menggusur lahan pertanian produktif masyarakat.

Sementara dalam kasus pariwisata, Presiden Jokowi justru hendak mengencarkan pariwisata model *storiomics tourism*. Model ini menitikberatkan partisipasi swasta. Bukan masyarakat sekitar. Sehingga keuntungan dari industri pariwisata pun akan mengalir pada pemilik modal. Seharusnya, alokasi anggaran pariwisata dapat diarahkan untuk menunjang model pariwisata berbasis masyarakat, yang cenderung lebih adil dan ramah lingkungan. Konsep yang dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT) terbukti memberi keuntungan lebih kepada masyarakat, seperti praktik yang dilakukan di Kedonganan, Bali (Walhi, 2020).

4. Membajak Sekaligus Memperdalam Krisis

⁴Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/07000961/kajian-kpk-soal-kartu-prakerja-ada-konflik-kepentingan-rawan-fiktif-hingga?page=all> (Diakses pada 18 Agustus 2020, 01:44 WIB).

“Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahakan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata bajak yang digunakan Jokowi dengan arti *ambil alih secara paksa, disertai ancaman*. Karena itu, mari kita lihat apa yang hendak dibajak Jokowi di tengah krisis pandemi ini. Menurut WALHI, Jokowi hendak menyampaikan pesan untuk mengambil alih secara paksa dominasi Covid-19 sebagai mikro parasit, lalu membawa bangsa ini melompat maju dengan menaruh target yang tidak tanggung-tanggung, “bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis”, tapi sekaligus untuk menyongsong Indonesia maju 25 tahun mendatang. Persis pada momen satu abad kemerdekaan.

Paling tidak ada tiga hal yang akan dilakukan Jokowi untuk membajak krisis, yaitu (1) pembangunan *food estate*; (2) kemandirian energi dengan minyak sawit dan biji nikel (baterai lithium); dan (3) membangun kawasan-kawasan industri. Ketiga hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem nasional yang kondusif. Terminologi “ekosistem nasional yang kondusif” ala Jokowi mengingatkan kita pada istilah “stabilitas nasional yang dinamis” dalam Trilogi Pembangunan Orde Baru.

Terhadap tiga hal yang dilakukan tersebut, WALHI memberi tiga kritik. **Pertama**, pembangunan *food estate* merupakan pilihan kebijakan menangani krisis yang melulu direlasikan dengan target pemulihan ekonomi. Serupa dengan kebijakan pangan sebelum pandemi, ia abai pada aspek sosial (termasuk kebudayaan) dan lingkungan. Dalam pidatonya, Jokowi tegas menyatakan pembangunan *food estate* tidak sekedar melayani kebutuhan pasar domestik, tapi juga untuk pasar Internasional. Lagi pula, negara ini sudah dua kali gagal melangsungkan proyek ambisius semacam ini. Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada era Orde Baru. Kemudian, pascareformasi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki proyek 100.000 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat dan 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara.⁵ Bahkan dalam sejarah, proyek ini mencatat kerugian negara, merusak lingkungan yang mengakibatkan rakyat memperoleh dampaknya, dan meninggalkan jejak konflik agraria.⁶

Kedua, pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan sawit dan nikel. Bagi WALHI, kebijakan ini hanya kedok untuk melanggengkan investasi dan laju industri ekstraktif. Faktanya, kebijakan biodiesel dengan sawit sebagai bahan baku utamanya, tidak murni mengganti penggunaan energi fosil. Bahkan ada indikasi tujuan kebijakan ini guna menutup kerugian perusahaan sawit yang produksinya tidak terserap pasar. Pengembangan D100 (minyak sawit) merupakan kedok menyelamatkan jutaan hektar investasi ilegal perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan dan/atau tidak mempunyai perizinan lengkap. Ambisi ini juga berpotensi melanggengkan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain merusak lingkungan, hal ini berpotensi

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yang-disebut-jokowi-dalam-pidato?page=all> (Diakses pada 25 Agustus 2020).

⁶ Lihat: <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah> (Diakses 25 Agustus 2020).

menaikkan eskalasi konflik agraria. Begitupula dengan rencana mengembangkan biji nikel sebagai bahan baku baterai (lithium). Kebijakan ini muncul beriringan dengan hasrat konglomerat untuk mulai merambah bisnis 'energi bersih'. Salah satu produk yang sering mengemuka adalah mobil listrik. Karena bahan bakar utama mobil listrik adalah baterai, maka pertambangan biji nikel akan menjadi ceruk yang menggiurkan. Semakin pertambangan nikel digenjut, maka makin besar pula kerusakan lingkungan yang terjadi.

Ketiga, Jokowi menjelaskan pembangunan kawasan industri akan dilakukan bersinergi dengan UMKM. Bagi WALHI, pernyataan ini hanya tipuan instrumen pembangunan global. Kebijakan ini makin memperteguh kepercayaan keliru bahwa kebaikan investasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan selaras dan mampu membawa kesejahteraan bagi kelas menengah dan bawah (*trickle down effect*). Padahal faktanya, konsep semacam ini sudah lama terbukti gagal. Di samping itu, dalam banyak kasus, pembangunan kawasan industri justru malah meminggirkan kelompok kecil. Pembangunan skala besar, termasuk kawasan industri, hanya menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai penopang akumulasi kesejahteraan (modal) kelas atas.

5. Potret Kecil 75 Tahun Merdeka

WALHI mencatat bahwa 61,46% daratan telah dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68. Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan. Apabila dipoteret secara lebih makro, ketimpangan ekonomi di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi setelah Thailand di ASEAN dan berada di peringkat keempat tertinggi di dunia.⁷

Kebanggaan pemerintah terhadap peningkatan status Indonesia sebagai *upper middle income country*,⁸ malah kontras dengan publikasi statistik kemiskinan. BPS menyebut bahwa selama triwulan awal 2020—sebelum atau pada masa awal pandemi—terdapat peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,56 persen poin atau meningkat 1,63 juta dibanding September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhitungan kesejahteraan dengan metode pendapatan per kapita sama sekali acuh pada aspek ketimpangan kemiskinan antar penduduk. Publikasi World Bank pada awal 2020 menyebut terdapat 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia yang baru lepas dari garis kemiskinan dan berpotensi kembali miskin.⁹

Menurut WALHI, sajian data di atas, ditambah kondisi faktual ekonomi pandemi setelah Maret 2020, malah menjadi bukti angka kemiskinan, potensi kemiskinan, dan ketimpangan merupakan wajah Indonesia sesungguhnya. Bajakan dan lompatan yang disebut Jokowi hanya berlaku bagi mereka yang menjadi bagian 1% penguasaan lahan dan penduduk *upper middle income*. Fakta ini dapat dilihat dari beberapa konflik agraria dan sumber daya alam yang malah semakin memuncak selama masa pandemi. Dimulai dari kriminalisasi tiga

⁷ Lihat: <https://kbr.id/nasional/10-2019/indonesia-negara-keempat-tertinggi-di-dunia/100826.html>, (Diakses pada 7 Agustus 2020).

⁸ Lihat misalnya: https://tirto.id/bank-dunia-naikkan-indonesia-jadi-upper-middle-income-country-fM14?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait, (Diakses pada 20 Agustus 2020).

⁹ Wai-Poi dkk, *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*, The World Bank, September 2019, hlm xviii.

masyarakat adat Desa Penyang, Kalimantan Tengah—satu diantaranya meninggal dalam proses hukum—diikuti pembunuhan dua petani Lahat, Sumatera Selatan; pembakaran tanaman mangrove petani hutan di Sumatera Utara; kriminalisasi Bongku masyarakat adat Sakai di Riau; tindakan represi pejuang penolak tambang emas di Tumpang Pitu, Jawa Timur; kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan wilayah tangkap nelayan Kodingareng oleh aktivitas tambang pasir; dan penggusuran masyarakat adat Pubabu di NTT.

Pilihan Jokowi menggunakan baju adat NTT kontras dengan kondisi yang terjadi di sana. Pilihan baju tersebut sama sekali tidak ada relasinya dengan keberpihakan Jokowi—negara—terhadap masyarakat adat. Menurut WALHI, pilihan baju tersebut sekadar pilihan berbusana, tanpa pesan, tanpa keberpihakan, dan tanpa makna. Hanya sebuah *gimmick* politik. Kesadaran mengenakan baju adat tidak dibarengi dengan kesadaran melindungi masyarakat, tanah, dan wilayah adatnya.

Kemudian pandemi pun dijadikan alat bajak demokrasi. Wabah covid-19 justru dimanfaatkan untuk membungkam suara tiga orang aktivis lingkungan di Kalimantan Timur. Selain itu, momentum pandemi juga dimanfaatkan untuk meloloskan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada kemanusiaan dan lingkungan hidup.

6. Menormalkan Indonesia → Mencegah Lompatan Ke Jurang Terjal

Lompatan besar yang dimaksud Jokowi bukanlah lompatan yang ditujukan untuk memuliakan rakyat. Malah menjadi sebuah pondasi lompatan besar memperkokoh kepentingan segelintir orang, korporasi, oligarki, dan makro parasit. Ekosistem nasional yang kondusif merupakan suatu terminologi melanggengkan ekspansi moda produksi kapitalisme. Tawaran solusi “membajak krisis” ala Jokowi sama sekali tidak berdaya pulih, malah melahirkan landasan baru memperparah krisis pada masa depan.

Jokowi tidak kami sarankan membuat pidato baru. Bagi WALHI, ia lebih penting memaknai apa hakikat penting negara bagi rakyatnya, bukan bagi korporasi, investasi, oligarki, dan makro parasit. Apabila hendak melahirkan situasi yang sungguh *new normal* dan lepas dari krisis, maka terdapat dua hal pokok yang harus dilakukan, yaitu (1) meninggalkan pilihan berekonomi secara kapitalistik; (2) berhenti menggunakan hukum secara represi dan memilih untuk mendengar suara-suara rakyat secara demokratis. Tahap awal untuk menjalankan dua hal tersebut, dapat dimulai dengan melaksanakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/MPR/2001) secara konsisten. Sebab perkara tanah dan sumber daya alam adalah hal mendasar. TAP MPR IX/MPR/2001 merupakan cara utama menyelesaikan persoalan pokok negara ini. TAP MPR ini akan membantu kita melompat jauh dari krisis, bukan melompat ke jurang krisis yang lebih terjal.

Tawaran ini tentu tidak akan dengan sendirinya dipilih Jokowi. Namun harus ada sebuah kekuatan besar yang mendorongnya. WALHI percaya, pilihan berekonomi dan berhukum tersebut hanya dapat terwujud ketika rakyat mengambil peran penting dalam berbagai proses demokrasi. Bersuara lantang dan melahirkan tekanan besar untuk menghentikan makro parasit terus

berinang pada rakyat. Meghentikan keserakahan mengeruk dan mendominasi sumber daya alam Indonesia.

Penulis: Boy Jerry Even Sembiring; Bagas Yusuf Kausan; dan Khalisah Khalid